

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 1, Januari 2018

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Iwan Setya Putra

Pemimpin Editor

Sulistya Dewi Wahyuningsih

Sekretaris Editor

Yuyung Rizka Aneswari

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

Manajemen

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 3 No 1, Januari 2018

Daftar Isi

Retno Murni Sari

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.... 1-21

Amram Rohi Bire, Jeremias A. Alang, Heny M. Sauw

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Usaha Ikan Bakar Liliba (L2b) Di Kota Kupang 22-33

Dewi Novitasari, Ari Dewi Cahyati

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underpricing* Saham pada Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) 34-64

Ludi Wishnu Wardana, Yuli Agustina

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto. 65-84

Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh

Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional 85-94

Norma Yunita, Iwan Setya Putra

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Perbudpar Kota Blitar 95-108

Sura Klaudia, Titik Nur Rohmah, Yuwanda Vintia Devi, Caecellia Ratu Luphita Ayu

Menakar Pengaruh Risiko, *Return*, Pemahaman Investasi, dan Modal Investasi Terhadap Minat UMKM dalam Memilih Jenis Investasi 109-124



FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH GUNA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR

Norma Yunita¹

Iwan Setya Putra²

^{1,2} STIE Kesuma Negara Blitar

Surel : iwan@stieken.ac.id

Abstrak. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pola penyerapan anggaran belanja yang terjadi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar untuk Tahun Anggaran 2014, 2015 & 2016 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, nilai ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran di setiap akhir Tahun Anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode perbandingan. Sampel yang digunakan adalah Dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan target yang ditetapkan penulis membandingkan dengan hasil penyerapan anggaran. Penelitian ini memiliki 4 faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yakni Faktor Perencanaan anggaran, proses Pengadaan & syarat administrasi, proses pembayaran dan Sumber Daya Manusia. dari keempat faktor ini seluruhnya menjadi pendorong pencapaian target penyerapan lebih maksimal di pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perencanaan anggaran, Laporan Realisasi Anggaran

Abstract. Factors That Influence The Budgeting Of Budget Shopping For Optimization Of Financial Management In Porbudpar City Of Blitar. One of the necessary tools in the making is through the government sector. In essence, this is the goal to provide goods and services, as well as the various needs that can not be provided by the private sector. Therefore a dynamic and scheduled process is needed to accelerate the development process and spur the rate of economic growth. Pattern of Fund Updates that occurred at the Department of Youth, Sports, Culture, and Tourism of Blitar City for Fiscal Year 2014, 2015 & 2016 not in accordance with the target set, namely: This

research is a quantitative study by comparison method. The sample used is Planning Document and Budget Realization Report. Based on the target set by the author with the results of budget absorption. This research has four factors that can affect the existing budget, Procurement process and also administration, payment process and Human Resources. From this institution become the driving of attainment of maximal target in local government.

Keywords: *Budget Planning, Budget Realization Report*

Kota Blitar merupakan kota kecil yang berada di ujung selatan dari propinsi Jawa Timur. Sebagai kota perdagangan barang dan jasa menjadikan pemerintah daerah setempat harus jeli dalam menjaga laju perkonomiannya, utamanya laju mengatur keuangan daerah yang memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Perlunya ketepatan dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan anggaran belanja sebagai bentuk mendukung program – program kepala daerah dalam mencapai visi dan misi yang dibawa. Anggaran Belanja Daerah yang sudah disusun atau direncanakan akan direalisasikan melalui kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan sesuai jadwal pelaksanaan dalam satu periode anggaran. Dalam Laporan keuangan Pemerintahan, Belanja dibedakan menjadi dua yaitu Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung. Sedangkan laporan realisasi anggaran belanja akan disajikan melalui Laporan Realisasi Anggaran yang didalamnya memberikan informasi tentang berapa jumlah anggaran yang terealisasi baik anggaran pendapatan dan Belanja yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dari laporan Realisasi Anggaran akan dijelaskan

lebih rinci didalam Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana dalam CALK ini mencantumkan hal –hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Selain itu daftar – daftar yang menjelaskan angka – angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan, harus tetap dimunculkan dalam sebuah CALK.. Namun dalam merealisasikan anggaran belanja daerah kadang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini bisa dilihat dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui jumlah prosentase penyerapan anggaran dari masing – masing kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga jika prosentase realisasi ini bisa dihitung maka bisa diketahui tingkat penyerapan anggaran yang perlu ditingkatkan apabila prosentase yang diharapkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila tingkat penyerapan diketahui memiliki prosentase yang rendah tentunya akan berdampak pada pengambilan keputusan bagi Pengguna Anggaran di sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Kepala Daerah di sebuah Pemerintah Daerah. Tingkat realisasi anggaran di Pemerintah Kota Blitar khususnya di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Blitar tentu saja menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintahan di Kota Blitar. Diperlukan langkah – langkah yang tepat guna mencegah dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Dimana dengan terjadinya keterlambatan realisasi, masyarakat merasa dirugikan karena tidak segera merasakan manfaatnya. Sebagai SKPD yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perekonomian di Kota Blitar, salah satunya menjadi pintu gerbang kedatangan para wisatawan baik wisatawan Domestik maupun manca Negara yang mana dampak kunjungan ini membawa multiefek yang sangat berperan dalam laju perdagangan barang dan jasa di Kota Blitar, perlunya berhati – hati dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya dengan seoptimal mungkin. Dari penyusunan anggaran belanja yang ada di Dinas Porbudpar Kota Blitar perlu dievaluasi lebih lanjut agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa dibelanjakan secara efektif dan efisien . Hal ini bertujuan supaya penyusunan anggaran benar – benar bisa optimal dalam menentukan mana kegiatan yang paling prioritas dan mana yang tidak. Sebab perencanaan yang tepat tentu saja berdampak pada pelaksanaan kegiatan itu sendiri dimana tidak akan terjadi kesulitan atau kendala dikemudian hari. Ketepatan dalam penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu adanya perubahan dan revisi penyusunan anggaran pada saat P-APBD dimana perubahan

anggaran ini biasanya terjadi di tribulan akhir Tahun Anggaran, bisa mempengaruhi pencapaian realisasi kegiatan dan juga anggaran pada sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat adanya keterbatasan waktu pelaksanaan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah dengan studi kasus Di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.

Permasalahan

Anggaran Belanja di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota Blitar telah disusun dan tertuang dalam bentuk DPA-SKPD (Dokumen Perencanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam merealisasikan anggaran dilaksanakan melalui berbagai macam Program dan kegiatan yang telah ditentukan jadwal pelaksanaannya diawal tahun anggaran. Dalam setiap periode laporan keuangan akan terlihat penyerapan realisasi anggaran belanja yang terdiri dari beberapa rekening Belanja dari kegiatan – kegiatan di SKPD. Sesuai dengan kebijakan keuangan yang sudah ditentukan penyerapan realisasi anggaran dengan perhitungan 10 % di Triwulan 1, 40 % di Triwulan II, 30 % di Triwulan III, 20 % di Triwulan IV. Namun dari Laporan Realisasi Anggaran belum menunjukkan penyerapan sesuai

dengan prosentase yang telah ditentukan. Di lihat dari penyajian Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, LRA dan CALK diketahui Prosentase penyerapan kurang dari 100 %, hal ini diketahui dari prosentase yang muncul khususnya di Laporan realisasi Anggaran pada tahun 2015 yaitu pada rekening Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Dari penelitian ini diharapkan akan bisa diketahui langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan Daerah.

Rumusan Masalah

Bagaimana menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah ?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah

Kegunaan Penelitian

Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagi Dinas Porbudapar Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Blitar guna meningkatkan target penyerapan Anggaran Belanja Daerah ditahun – tahun berikutnya sebagai bentuk kepedulian kami akan majunya pembangunan di bidang Olahraga, kebudayaan dan pariwisata di Kota Blitar. Bagi Pembaca Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan guna penelitian selanjutnya.

TELAAH LITERATUR

Hasil Penelitian Terdahulu

Carlin Tasya Putri (2013) dengan judul “Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu”. Adapun hasil penelitiannya ada 5 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, Sumber Daya Manusia, Dokumen, Pengadaan dan Uang Persediaan.

Penelitian lainnya oleh Prasetyo Adi Priatno (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran di KPPN Blitar”. Hasil penelitian “ada 3 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu administrasi dan SDM, Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa”

Penelitian oleh Iwan Dwi Kuswoyo (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor – factor penyebab penumpukan anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satuan kerja diwilayah KPPN Kediri”.

Hasil penelitiannya ada 4 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan factor internal satker.

Pengertian Penyusunan Anggaran

Pengertian Penyusunan Anggaran menurut Bastian (2006:189) “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang yang diperuntukan dalam satu tahun dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat”. Beberapa ahli juga mengatakan diantaranya Haruman & Rahayu (2007:3) pengertian Anggaran adalah “ suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan koordinasi dan pengawasan”.

Dalam penyusunan anggaran tahun 2015 didasarkan pada prinsip sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.37 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pengertian Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat1 Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan Urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, Program dan kegiatan serta jenis belanja. Sedangkan menurut Peraturan menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang

klasifikasi Anggaran, Anggaran dibedakan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansos & Belanja Lain-lain. Adapun pengklasifikasian belanja daerah ini bertujuan Sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaanya seperti para pengambil keputusan, masyarakat, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Bagian keuangan dan sebagainya); Sebagai bahan mencukupi kebutuhan administrasi anggaran dan akuntansi anggaran; dan Sebagai bahan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Penganggaran belanja langsung di Pemerintah Daerah melalui penyusunan APBD dilakukan untuk mencapai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun penganggaran belanja langsung dimaksud akan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public keberpihakkan pemerintah daerah kepada kepentingan public.

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Christopher & schooner (2007) Pengadaan adalah “suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

penggunaannya “. Sedangkan dalam arti khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh SKPD yang dalam prosesnya diawali dengan proses perencanaan kebutuhan, dalam hal ini masing – masing Satker menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya diproses guna memperoleh Barang/Jasa dimaksud. Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar No.7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dengan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan Barang / Jasa. Dalam pelaksanaannya pengadaan barang/jasa berpedoman pada Perwali No.7 Tahun 2015 Barang / Jasa yang sudah dilakukan pengadaannya akan diserahkan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan baik itu pengadaan barang/jasa maupun barang kontruksi /jasa lainnya dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima. Ada beberapa jenis proses pengadaan barang/jasa diantaranya Swakelola, Kontrak, Metode Penunjukan Langsung dan Metode Lelang Terdapat perbedaan dokumen atau syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam setiap jenis proses

pengadaan. Adapun dokumen syarat administrasi yang harus dicukupi dalam setiap proses pengadaan telah ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Apabila dalam melakukan proses pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dengan baik dan dapat melengkapi semua dokumen atau syarat administrasi yang diperlukan maka realisasi anggaran belanja dalam masing – masing program dan kegiatan dapat segera terrealisasikan. Sehingga tidak terjadi penundaan penyerapan anggaran. Namun terkadang masing – masing PPKom mengalami kendala dalam proses pengadaan yang dilaluinya, hal ini disebabkan masih adanya dokumen atau syarat – syarat administrasi yang belum terpenuhi.

Pengertian Penyerapan Anggaran

Dalam proses percepatan penyerapan anggaran dapat melalui beberapa strategi diantaranya melalui penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran, penyederhanaan prosedur revisi anggaran, percepatan penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor, penyederhanaan format DPA –SKPD dalam rangka meningkatkan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran dan integrasi database RKA –SKPD dan DPA sehingga mempercepat penerbitan DPA. Peran pemerintah dalam percepatan anggaran juga diwujudkan dalam bentuk penerapan *reward and punishment* untuk mengupayakan pengelolaan keuangan Negara secara efektif. Penerapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan

pelaksanaan dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat / Daerah. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan M.Chatib Basri pada saat penyerahan DIPA Tahun 2014 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor (MoF (Fiscal) News : 2013) dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran. Selain hal – hal diatas dalam menjaga *governance*, pemerintah juga menerapkan kebijakan DIPA tanpa blokir yang artinya apabila masih ada alokasi anggaran yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku, suatu misal belum ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau belum ada dasar hukumnya atau adanya alokasi anggaran yang belum jelas keperuntukannya maka alokasinya dapat dituangkan dalam output cadangan atau diberikan catatan dalam dokumen DIPA sehingga Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran dapat segera memenuhi kewajibannya seperti apa yang dipersyaratkan sehingga anggaran tersebut segera dapat direalisasikan.

Hubungan antara faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pada tahap awal yang harus dilakukan adalah menyusun perencanaan anggaran. Dalam menyusun perencanaan anggaran ini dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menentukan jenis belanja sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut

bertujuan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan secara administrasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku . Program dan kegiatan yang sudah direncanakan dimaksud hendaknya dilaksanakan dan direalisasikan pembelanjanya sesuai perencanaannya. Namun apabila terjadi kesalahan dalam proses perencanaan anggaran ini, akan berdampak kurang baik dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Sehingga perlu waktu lagi dalam proses revisi Dokumen Perencanaan Anggaran. Proses revisi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan dan keterlambatan penyerapan anggaran. Selanjutnya setelah proses perencanaan selesai dilanjutkan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, dimana dalam tahapan ini memiliki beberapa metode dan kelengkapan administrasi yang sudah berpedoman pada peraturan yang berlaku. Diperlukan ketepatan dalam pemilihan metode pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan syarat – syarat pengadaan yang sudah ditentukan, hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diproses lebih lanjut dan diakui sebagai realisasi anggaran yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun apabila syarat – syarat administrasi ini tidak dapat dipenuhi maka belum bisa dilaporkan sebagai realisasi anggaran. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang

baik yaitu kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehingga peneliti menentukan bahwa proses pengadaan dan syarat – syarat administrasi memiliki hubungan yang erat dengan penyerapan anggaran guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka pelaksanaan anggaran harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan. Penatausahaan belanja memegang peranan yang sangat dominan atas pengelolaan pengeluaran kas atas beban APBD. Proses pengajuan pembayaran ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis belanjanya. Pemilihan proses pengajuan dengan tepat akan memperlancar pencairan dana, sehingga anggaran belanja segera terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila proses pengajuan pembayaran ini mengalami keterlambatan maka akan terjadi keterlambatan realisasi dan belum bisa dilaporkan sebagai penyerapan anggaran. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pejabat Pengelola Keuangan untuk mensinkronkan pemilihan pengajuan pembayaran ini agar penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan tepat waktu. Faktor Sumber Daya Manusia yang ada didalam instansi pememerintah perlu diaudit dalam rangka memastikan bahwa semua Pejabat Pengelola Keuangan sudah memiliki kompetensi di Bidanganya, hal ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Adanya sertifikasi bagi pejabat pengelola keuangan akan menentukan pemahaman bagi masing – masing pejabat akan Tupoksinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan atau praktek – praktek KKN yang dapat berdampak kurang baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi instansi yang ditempati. Masih adanya keterbatasan jumlah personil dan tidak didukungnya dengan pembekalan bagi Pejabat Pengelola Keuangan akan menyebabkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan dengan lancar. Ketidakhahaman akan suatu prosedur administrasi, prosedur pengelolaan keuangan, pelaporan dan bentuk pertanggungjawabab suatu kegiatan akan mempersulit terealisasinya anggaran dengan tepat waktu. Diperlukan pelatihan dan pembekalan tentang pengelolaan keuangan dan prosedur – prosedur pembelanjaan untuk menghindari kesalahan – kesalahan yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar.

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dengan metode perbandingan.

Definisi operasional variabel

Perencanaan anggaran merupakan suatu proses untuk menentukan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) di masing – masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Proses pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Selanjutnya seluruh rangkaian kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengacu pada pedoman yang sudah ditentukan Pengajuan Pembayaran merupakan proses pemindahan sejumlah uang (dana) dari rekening Kas Daerah kepada pihak penyedia Barang/jasa . Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan kualitas seseorang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya didalam sebuah instansi/perusahaan.

Populasi dan sampel

Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Populasi dalam

penelitian ini adalah data Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca & CALK .

Sedangkan untuk sampel data peneliti mengambil data Laporan Realisasi Anggaran di tahun 2015.

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah (1) Observasi (2) Dokumentasi dan (3) Wawancara

Observasi dapat diartikan sebagai sebuah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan mencatat gejala – gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti akan mendatangi tempat penelitian dan mengamati proses pengelolaan keuangan dan mencari sample yang ada didalamnya.

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang tertuang dalam bentuk dokumen - dokumen, buku, catatan, surat, laporan keuangan dan data – data lain yang dianggap sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data – data terkait dengan data keuangan yaitu Laporan Keuangan di Dinas Porbudpar Kota Blitar terdiri dari Neraca, Laporan Realiasi Anggaran, Laporan Penjabaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan jawaban dari seorang penanya kepada responden (yang ditanya) yang dilakukan secara langsung / bertatap muka atau berhadapan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan

informasi yang belum tertuang dalam data – data laporan keuangan. Informasi yang didapat dari hasil wawancara akan disinkronkan dengan data yang ada di laporan keuangan..

Teknis analisa data

(1) Menganalisa Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan cara melakukan perbandingan jumlah anggaran sebelum dan sesudah P-APBD. (2) Menganalisa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dengan cara melakukan perbandingan jumlah atau prosentase penyerapan anggaran dengan target penyerapan. (3) Menganalisa data kepegawaian dengan cara melakukan perbandingan antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Dinas Pemuda Olahraga, kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini beralamat di jl. Ir. Soekarno No.11 Blitar. Untuk menjalankan tugasnya dalam urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas ini melaksanakan beberapa fungsi dan mempunyai kewenangan yang sudah tertuang di Perwali No. 30 tahun 2014. Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemuda dan Olah Raga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Bidang Pengelolaan Kawasan Pariwisata. Masing – masing memiliki tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Visi Dinas Porbudpar “Terwujudnya pariwisata kebangsaan yang dilandasi budaya lokal dengan didukung pemuda dan masyarakat berprestasi di bidang olahraga dan seni”. Misi Dinas Porbudpar Kota Blitar ditetapkan sebagai diantaranya mewujudkan profesionalisme pelayanan masyarakat, mewujudkan Generasi muda yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi masyarakat, mewujudkan masyarakat yang berkesenian dan berkebudayaan dengan penguatan seni budaya lokal, meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pengembangan obyek wisata dengan mengedepankan partisipasi insan pariwisata.

ANALISA DATA

Menganalisis perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD

Dalam DPA (SKPD) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tertuang rencana program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dilakukan perubahan perencanaan program dan kegiatan disetiap tahun anggaran yaitu di Tahun 2014 s/d 2016. Peneliti melakukan analisa dengan cara melakukan perbandingan anggaran yang disusun sebelum dan sesudah P-APBD .

Menganalisis penyerapan anggaran belanja

Penyerapan anggaran belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran . Didalam LRA disajikan jumlah pagu anggaran dan jumlah prosentase realisasi anggaran yang terjadi selama satu tahun anggaran. dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja.

Menganalisis data kepegawaian

Dari hasil wawancara dan pendataan pegawai jumlah personil Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar diketahui jumlah pegawai beserta status kepegawaian dimasing – masing personil.

Berdasarkan penempatan personil beberapa menjabat sebagai pejabat pengelola keuangan . Penempatan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Peneliti menganalisa data kepegawaian dengan cara membandingkan jumlah pegawai dengan kebutuhan.

Pembahasan

Pada tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa terjadi pergeseran anggaran disemua program dan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak mengalami perubahan anggaran yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sedangkan jika dilihat dari sisi penganggarnya terjadi kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.401.107.832,22,-. Pada tahun 2015 dapat dijelaskan bahwa terjadi pergeseran anggaran pada semua program dan ada 7 (tujuh) kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, sedangkan jika dilihat dari sisi penganggarnya terjadi penurunan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.629.639.155,18,-. Pada tahun 2016 dapat dijelaskan bahwa terjadi pergeseran anggaran pada semua program dan ada 16 (enam belas) kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, sedangkan jika dilihat dari sisi penganggarnya terjadi kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp. 749.000.000,-. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014, terjadi realisasi belanja sebesar Rp. 11.123.313.846,00,- atau 89,68 % dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 12.338.994.880,06. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015, terjadi realisasi belanja sebesar Rp.

11.302.073.268,- atau 90,49 % dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 12.490.064.891,82.

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016, terjadi realisasi belanja sebesar Rp. 16.835.852.644,- atau 94,78% dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.

17.763.767.381,-. Daftar pejabat pengelola keuangan Dinas Porbudpar 2014, ada 10 pegawai yang menduduki sebagai pejabat pengelola keuangan, sedangkan dilihat dari latar belakang pendidikan ada belum ada yang memiliki latar pendidikan di bidang Administrasi Pemerintahan.

Daftar pejabat pengelola keuangan Dinas Porbudpar 2014, ada 12 pegawai yang menduduki sebagai pejabat pengelola keuangan, sedangkan dilihat dari latar belakang pendidikan belum ada yang memiliki latar pendidikan di bidang Administrasi Pemerintahan.

Daftar pejabat pengelola keuangan Dinas Porbudpar 2014, ada 12 pegawai yang menduduki sebagai pejabat pengelola keuangan, sedangkan dilihat dari latar belakang pendidikan belum ada yang memiliki latar pendidikan di bidang Administrasi Pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pencapaian prosentase penyerapan anggaran dimasing – masing triwulan sebesar 10 % di Triwulan 1, 40 % di Triwulan II,

30 % di Triwulan III, 20 % di Triwulan IV, namun dari masing – masing target penyerapan dimaksud masih belum tercapai semua sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran melalui P-APBD. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar melakukan perubahan anggaran setiap tahun, sedangkan jadwal P-APBD di tetapkan di triwulan III setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan anggaran di akhir – akhir tahun yang dapat berisiko untuk tidak terserapnya seluruh anggaran karena terbatasnya jangka waktu yang ada. Berdasarkan Laporan Keuangan 2014, 2015 & 2016 capaian Realisasi anggaran belum mencapai 100% untuk setiap tahunnya dan masih dijumpai perubahan anggaran khususnya untuk jenis belanja langsung yang memiliki program dan kegiatan yang harus dilinierkan dengan agenda pemerintah propinsi atau pemerintah pusat. Tahapan atau prosedur penatausahaan dalam proses pencairan dana masih dijumpai kendala – kendala di beberapa kegiatan salah satunya sering terjadinya kesalahan – kesalahan administrasi diantaranya salah penomoran jenis rekening belanja. Selain itu adanya penundaan pengajuan pencairan dana ketika selesai kegiatan mengakibatkan belum bisa diakuinya sebagai penyerapan anggaran mengingat pencapaian target penyerapan anggaran hanya diakui setelah proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Dinas

Pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata hanya terdiri dari 1 (satu) orang sesuai surat-surat penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa SKPD yaitu pejabat yang bersertifikasi, sedangkan kondisi di Dinas Pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kota Blitar hanya 1 orang saja yang memiliki sertifikat dimaksud. Pejabat Pengelola Keuangan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar sebagian belum memiliki kompetensi di bidang keuangan dan masih dijumpai kesalahan dalam melakukan administrasi, sehingga banyak koreksi atau penolakan dalam proses keuangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kota Blitar.

Saran

Guna menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun Dinas Pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata Kota Blitar perlu memiliki komitmen bersama oleh seluruh pejabat pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan, selanjutnya segera melakukan proses pencairan anggaran setiap selesai melaksanakan kegiatan. Dalam proses penyusunan anggaran hendaknya melakukan koordinasi yang lebih dalam dengan pihak-pihak terkait (instansi terkait, pejabat pengelola keuangan, pengguna anggaran, operator SIPAPBD) untuk meminimalisasi kesalahan sehingga tidak terjadi kendala pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga segera dapat dilakukan proses pembayaran. Diperlukan

ketelitian, kecermatan dan verifikasi terlebih dahulu terhadap dokumen dan bukti-bukti transaksi oleh pejabat pelaksana sebelum mengajukan proses pembayaran agar tidak terjadi penolakan baik di pejabat SKPD maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bagi pejabat pengelola keuangan yang belum memiliki kompetensi di bidang keuangan diperlukan pelatihan dan bimtek khusus untuk menunjang tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat pengelola keuangan, apabila belum mengikuti pelatihan dan bimtek keuangan dapat meningkatkan ketrampilannya dengan meningkatkan minat belajar untuk memperlancar tugasnya tersebut. Bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar hendaknya melakukan evaluasi kinerja baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun kinerja karyawannya setiap akhir triwulan untuk mengantisipasi adanya penumpukan anggaran di akhir tahun.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian.2006. *Akuntansi Sektor Publik* :Surat Pengantar.Erlangga.Jakarta
- Christopher dan Schooner.2007.Incrementalism : Eroding The Impediments to a Global Public Procurement Market. *Journal of International Law* 38(320) : 529-576. George Washington University - Law School.Washington

- Haruman dan Rahayu.2007.*Penyusunan Anggaran Perusahaan*.Edisi kedua.Graha Ilmu. Yogyakarta
- Kuswoyo,Iwan Dwi.2011.Faktor – factor penyebab penumpukan anggaran belanja di akhir tahun anggaran apada satuan kerja diwilayah KPPN Kediri. *Tesis*.Program Studi S2 Magister Manajemen. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kotler & Keller.2012.*Marketing manajemen Edisi Empat Belas*.Erlangga.Jakarta
- Munandar,M.2014.*Budgeting*.BPF E. Yogyakarta
- Nafarin,M.2007.*Penganggaran Perusahaan*.Salemba Empat.Jakarta
- News MoF (Fiscal).2013.*Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran*.
<https://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-siapkan-langkah-langkah-dorong-percepatan-penyerapan-anggaran>. 10 Juni 2017 (11.17)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 tahun 2014. *Pedoman penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015*.Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat 1. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.15 Mei 2006.Jakarta
- Permenkeu No. 101/PMK.02/2011.*klasifikasi Anggaran*..Jakarta
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2015.*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar*.Pemerintah Kota Blitar
- Peraturan walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014.*Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar*. 30 Mei 2014. Pemerintah Kota Blitar
- Priatno,Prasetyo Adi.2013.Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran di KPPN Blitar.*Skripsi*.Jurusan Ilmu Ekonomi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.Malang
- Putri,Carlin Tasya.2014.Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu.*Skripsi*.Program Studi Akuntansi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.Bengkulu